



DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

**#Bersih
Makmur**

**#Berani
Tanglimp
Banyak**

*"Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi
Daerah dan Kualitas Pemanfaatan Ruang
Sektor Kelautan Perikanan"*

Kerja

**RENCANA
KERJA**

2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan "Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026" dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksana kegiatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Tahun 2026.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Rencana dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya mensinergikan program pusat dan daerah dalam menyongsong visi dan misi pemerintah di Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja 2026 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, 6 Oktober 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. ARIF LATJUBA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600418 199203 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2025	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II TA. 2025	7
2.1.1. Analisis capaian kinerja	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	13
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	22
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	30
4.1. Rencana Kerja	30
4.2. Program dan Kegiatan.....	33
4.3. Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan 2026	38
BAB V PENUTUP	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2025	7
Tabel 2.2 Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTN) Sulawesi Tengah Tahun 2025	8
Tabel 2.3 Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Sulawesi Tengah Tahun 2025	9
Tabel 2.4 Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah s.d. 2024	12
Tabel 2.5 Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap Peraturan per UU Tahun 2025* ...	13
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Sasaran	14
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Tengah..	15
Tabel 2.8 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Per Juni 2025	18
Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	19
Tabel 3. 1 Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	27
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	29
Tabel 4.1 Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan 2026	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 <i>Logframe</i> Misi 2	24
Gambar 3.2 <i>Logframe</i> Misi 3 Tujuan 1.....	24
Gambar 3.3 Bagan Alur Pikir Renstra 2025-2029.....	25
Gambar 3.4 Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Pembangunan di Daerah diwajibkan untuk dapat menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan dari keinginan masyarakat luas di daerah masing-masing dan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah memuat berbagai usulan dan rencana kerja serta program-program kegiatan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renja tahun 2026 ini pada dasarnya mengacu pada Ranhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029.

Menarik benang merah serta korelasi dan integrasi program dan kegiatan yang terpadu, sangat diperlukan lompatan pemikiran dalam penyusunan Rencana Kerja yang mumpuni, akuntabel, terupdate, dengan memperhatikan tolak ukur program/kegiatan berdasarkan output, outcome, benefit, dan impact dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengusung visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dituntut untuk dapat menjalankan

tugasnya dengan cepat, baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Guna dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menyusun Renja untuk tahun 2026. Diharapkan dengan perencanaan yang baik dapat menjalankan program pembangunan daerah Sulawesi Tengah dengan cepat dan tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
26. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042;
28. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
29. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

32. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
34. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 ini adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja tahun 2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman perencanaan bidang kelautan dan perikanan dalam mencapai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025 yang mengacu pada Rambah RPJMD 2026-2029 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2026-2029.
- b. Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II TA. 2025
 - 2.1.1. Analisis capaian kinerja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.2. Strategis dan Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Program dan Kegiatan
- 4.3 Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TA. 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II TA. 2025

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2025 DKP Sulteng telah menetapkan 3 sasaran strategis (SS) dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan	101,05	95,71	94,30
		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,03	92,57	91,62
		3. Angka Konsumsi Ikan	40,65	38,20	93,97
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan SDKP yang Berkelanjutan	4. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,1803	0,1802	99,92
3	Meningkatnya kualitas Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	5. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU	82	78,57	95,81

* angka sementara, triwulan II

2.1.1. Analisis capaian kinerja

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1: Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai Tukar Petani (NTP) yang berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.

NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani perikanan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi

pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani perikanan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani perikanan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

❖ *IKU 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)*

Nilai Tukar Nelayan adalah perbandingan indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). NTN merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar dari produk perikanan tangkap dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 2.2 Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTN)
Sulawesi Tengah Tahun 2025

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTN
Januari	115,35	122,17	92,42
Februari	115,56	121,7	94,96
Maret	118,45	124,37	95,24
April	121,87	124,44	97,94
Mei	120,11	124,83	96,22
Juni	119,25	124,92	95,46
Rata-rata			95,71

Pada awal tahun 2025, NTN Sulawesi Tengah adalah 94,42 dan terus berfluktuasi dan mencapai titik tertinggi pada April 2026 sebesar 97,94 dan turun hingga sebesar sebesar 2,48 poin pada Juni 2025. Secara keseluruhan, NTN Sulawesi Tengah per triwulan II adalah sebesar 95,71. Hal ini disebabkan lebih tingginya indeks yang dibayarkan dibandingkan indeks yang diterima oleh nelayan, terutama pada konsumsi rumah tangga. Bila dibandingkan dengan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani (nelayan) (NTUP) pada triwulan II dimana perhitungan NTUP tidak memasukkan komponen biaya konsumsi rumah tangga namun lebih fokus pada kelayakan usaha, NTUP Nelayan Sulawesi Tengah adalah 100,80 atau sudah berada diatas 100.

❖ *IKU 2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)*

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan adalah perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib). NTPi merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan. NTPi juga menunjukkan daya tukar dari produk perikanan budidaya dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 2.3 Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
Sulawesi Tengah Tahun 2025

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTN
Januari	106,26	114,3	92,97
Februari	107,34	114,47	93,77
Maret	108,31	116,85	92,7
April	108,61	117,5	92,43
Mei	108,08	117,7	91,83
Juni	108,14	117,83	91,77
Rata-rata			92,57

Pada awal tahun 2025, NTPi Sulawesi Tengah adalah 92,97 dan mencapai titik tertinggi pada Februari 2025 sebesar 93,77. Secara keseluruhan, NTPi Sulawesi Tengah per triwulan II adalah sebesar 92,57. Hal ini disebabkan rendahnya indeks diberikan dibandingkan indeks yang diterima. Lebih tingginya indeks yang dibayarkan dibandingkan indeks yang diterima oleh nelayan, terutama pada Ib konsumsi rumah tangga. Bila dibandingkan dengan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani (pembudidaya) (NTUP) pada triwulan III dimana perhitungan NTUP tidak memasukkan komponen biaya konsumsi rumah tangga namun lebih fokus pada kelayakan usaha, NTUP Pembudidaya Sulawesi Tengah adalah 102,46 atau sudah berada diatas 100.

Adapun faktor penyebab fluktuatif pada NTP Perikanan, antara lain (1) kemampuan dalam produksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi masih rendah. Hal ini disebabkan hasil tangkapan ikan per satuan upaya cenderung tak menentu; (2) keterbatasan dalam memasarkan hasil tangkapan dan budidaya, baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, harga komoditas yang cepat berubah dan rentan mengalami *market glut*. *Market glut* adalah suatu kondisi pasar dengan harga jual menurun drastis ketika pasokan (*supply*) melimpah; (3) keterbatasan ketersediaan benih dan indukan unggul,

baik segi jumlah dan aksesibilitas; (4) faktor produksi lainnya yang relatif mahal, seperti alat tangkap, mesin kapal, dan keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi pada depot SPBU dan SPDN sehingga berpengaruh pada hari operasi; (5) serta kondisi cuaca yang ekstrem di wilayah Sulawesi Tengah berpengaruh pada usaha-usaha perikanan.

❖ *IKU 3 Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)*

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar.

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 40,65 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 38,20 Kg/Kap/Th* atau 93,97%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya proses penghitungan AKI Nasional pada tahun 2026. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 26,08 Kg/Kap/Th.

Faktor pendorong dari indikator ini adalah:

- Ketersediaan dan kontinuitas pasokan ikan
- Harga ikan yang relatif terjangkau dan stabil
- Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
- Peningkatan kesadaran gizi dan kesehatan masyarakat
- Pengembangan produk olahan hasil perikanan

Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2025 antara lain ikan selar, cakalang, dencis, kembung, lema, banyar, tongkol, matang, ekor kuning, teri basah, bandeng dan mujair.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan SDKP yang berkelanjutan

❖ *IKU 4 Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial*

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik dan penyamaan data dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP-RI) Tahun 2019.

Tahun 2025 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 0,1803 dan terealisasi sampai dengan September 2025 0,1802* atau sebesar 99,92%. Luas Pemanfaatan Lahan hingga Tahun 2025 adalah sebesar 3.380,41 Ha dengan luas laut Teritorial : 7.445.237 Ha.

Faktor pendorong dari indikator ini adalah:

- Perencanaan tata ruang laut yang jelas dan terintegrasi (RTRL, RZWP3K)
- Pemanfaatan kawasan yang sesuai fungsi dan berkelanjutan
- Kemudahan izin, subsidi, perlindungan hukum bagi pelaku usaha

Faktor Penghambat :

- Ketidaksesuaian regulasi pusat dan daerah, tumpang tindih izin
- Kerusakan ekosistem, polusi, rendahnya partisipasi masyarakat pesisir
- Prosedur perizinan kompleks, kurang insentif

Tahun 2025 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 0,1803. Kawasan konservasi perairan Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II tahun 2025* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah s.d. 2024

No.	KKP3K	Kabupaten	Luas (ha)	Kegiatan
1.	DOBOTO	Donggala	1.192,34	Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove
		Toli-toli	56.250,08	Pengembangan Informasi Kawasan
		Buol	17.320,30	Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang
LUAS KAWASAN			74.762,72	
2.	TOMINI	Parigi Moutong	131.693,59	Pengembangan Informasi Kawasan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove
		Poso	282,87	Pengembangan Informasi Kawasan
		Tojo Una-Una	7.563,40	Pengembangan Informasi Kawasan
LUAS KAWASAN			139.539,87	
3.	DALAKA	Banggai	111.253,93	Pengembangan Rehabilitasi Terumbu Karang
		Banggai Kepulauan	151.273,94	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
		Banggai Laut	633.620,99	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
LUAS KAWASAN			896.148,86	
4.	MOROWALI	Morowali	257.612,03	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
		Morowali Utara	41.983,07	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
LUAS KAWASAN			299.595,10	
LUAS TOTAL			1.408.291,55	

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku

❖ IKU 5 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU (%)

Nilai ini merupakan persentase dari jumlah usaha kelautan dan perikanan yang memiliki ijin (patuh) per total keseluruhan jumlah usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa. Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 82% dan terealisasi 78,57%* atau sebesar 95,81%. Pada tahun 2025 triwulan II terdapat 182 sampel pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa, dimana dari jumlah tersebut, terdapat 143 pelaku usaha yang patuh dan sisanya 39 pelaku usaha kurang patuh.

Tabel 2.5 Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap Peraturan per UU Tahun 2025*

No	Komponen Pelaku Usaha KP (n)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Diperiksa (si)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Patuh (ci)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Kurang Patuh
1	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	150	113	37
2	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	15	14	1
3	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	5	5	0
4	Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	12	11	1
Jumlah		182	143	39

Selanjutnya, upaya peningkatan kesadaran perijinan ini akan terus dilakukan baik melalui (1) Sosialisasi dan pendampingan regulasi (2) Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (3) SDM pengawas perikanan yang memadai (4) Kemudahan perizinan dan layanan usaha.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran pada Renstra 2021-2026 rata-rata mencapai target yang telah ditentukan. Namun, masih terdapat capaian kinerja beberapa indikator yang dirasa belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan besaran anggaran serta realisasi pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Sasaran

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urutan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi Tw II	Capaian	Ket
	Urutan Pilihan					
	Perikanan					
1	Produksi Perikanan (ton)	1.083.412,17	1.096.008,71	442.978	40,42	Angka sementara
	Persentase Produksi (%)	66,92	100,00	40,42	40,42	Angka sementara
	Produksi perikanan budidaya	791.156,47	818.643,76	329.346, 60	40,23	Angka sementara
	Produksi perikanan tangkap	292.255,70	277.364,95	113.631, 40	40,96	Angka sementara
2	Produksi Perikanan yang diolah (Kg)	6.844.871	6.855.712	3.697.89 3	53,93	Angka sementara
3	Konsumsi Ikan (Kg/Kap /Thn)	74,72	40,65	38,2	93,97	Angka sementara
4	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku,%)	3,06	3,00	3,06	102,00	Angka sementara
5	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku,Rp Juta)	10.860,72	11.295,15	10.860,7 2	96,15	Angka sementara
6	Nilai Tukar Nelayan (%)	93,58	101,05	95,71	94,30	
7	Nilai Tukar Pembudidaya (%)	92,01	101,03	92,57	91,62	
8	Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1802	0,1803	0,1802	99,92	Angka sementara
10	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang- undangan	93,49	82,00	78,57	95,81	Angka sementara

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Uraian	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2024	2025	2024	2025*	2024	2025*	Anggaran	Realisasi*
1	2	3		10	11	18	16	21	22
							Pendataan Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.4.944.324.000	Rp 6.177.050.000	Rp4.910.880.550	Rp1.915.404.000	0.99	0.31	24,93%	-60,97%
2	Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dana Alokasi Khusus	Rp.17.014.547.000	-	Rp16.030.736.107	-	0.94	-	-	-
4	Belanja Operasi	Rp.72.884.951.404	Rp.55.293.971.789	Rp67.279.840.382	Rp16.914.217.564	0.92	0.31	-24,24%	-74,86%
5	Belanja Modal	Rp.4.762.153.442	Rp.1.080.492.100	Rp4.694.344.549	Rp42.830.000	0.99	0.04	-77,32%	-99,09%
6	Total	Rp.99.605.975.846	Rp.62.551.513.889	Rp92.915.801.588	Rp18.872.451.564	0.93	0.30	-37,20%	-79,69%

Sumber: Data Anggaran Dislutkan Sulteng, Subbag Keuangan dan Aset (2025)

Secara garis besar, hasil pencapaian *outcome* bidang kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2025* adalah sebagai berikut:

- 1) Produksi perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Capaian produksi perikanan Sulawesi Tengah pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 442.978 ton atau sebesar 40,42 % dari target tahun 2025 sebesar 1.096.008,71 ton

Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya meliputi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba dan budidaya sawah. Pada semester pertama tahun 2025, capaian perikanan budidaya mencapai 329.346,6 ton atau sebesar 40,23% dari target 818.643,76 ton dan mencapai 41,63% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 791.156 ton.

Komoditi unggulan perikanan budidaya Sulawesi Tengah adalah rumput laut, udang dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria* sp. yang diusahakan pada budidaya tambak. Capaian produksi perikanan terbesar berasal dari Banggai Kepulauan dimana rumput laut merupakan penyumbang lebih dari 90% produksi budidaya Banggai Kepulauan.

Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Capaian produksi perikanan tangkap pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 113.631,4 ton atau sebesar 40,96% dari target produksi perikanan tangkap sebesar 277.364,95 dan 38,88% bila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap pada 2024 yaitu sebesar 292.255,7 ton. Cuaca, keterbatasan BBM dan keterbatasan sarana prasarana merupakan beberapa penentu dari berfluktuasinya produksi perikanan tangkap.

- 2) Pada triwulan II tahun 2025 capaian produksi perikanan yang diolah adalah sebesar 3.697.892,75 Kg atau sebesar 53,93% dari target yang ditetapkan sebesar 6.855.712 Kg dan mencapai 57,88% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 6.844.871 Kg.
- 3) Capaian PDRB Sub sektor perikanan Sulawesi Tengah berdasarkan harga berlaku sampai dengan triwulan II adalah 3,06% atau sebesar 102% dari target sebesar 3%
- 4) Capaian Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku,Rp. Juta) sampai dengan triwulan II adalah 10.860,72 (Rp. Juta) atau sebesar 96,15% dari target sebesar 11.295,15 (Rp. Juta) dan mencapai 100% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 10.860,72 (Rp. Juta)
- 5) Capaian nilai tukar nelayan sampai dengan triwulan II Adalah 95,71% atau sebesar 94,30% dari target yang ditetapkan sebesar 101,05% dan mencapai 100,76% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 93,58
- 6) Capaian nilai tukar pembudidaya ikan sampai dengan triwulan II Adalah 92,57% atau sebesar 91,62% dari target yang ditetapkan sebesar 101,03% dan mencapai 99,58% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 92,01%
- 7) Capaian Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial sampai dengan triwulan II Adalah 0,1802 atau sebesar 99,92% dari target yang ditetapkan sebesar 0,1803
- 8) Pada triwulan II tahun 2025 realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Adalah sebesar 78,57% atau sebesar 95,81% dari target yang ditetapkan sebesar 82%

dan mencapai 99,58% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 84,04%

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan umum, dilakukan melalui pemberian pelayanan perizinan, pelayanan penjualan benih, benur dan ikan konsumsi, pelayanan umum kenelayanan, pemberian data dan informasi publik terkait bidang kelautan dan perikanan serta pelayanan terkait pengembangan usaha lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan terutama pelayanan perijinan, Dislutkan Provinsi bermitra dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

- **Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP, Pengelolaan Ruang Laut; dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** menangani masalah perijinan dan non perijinan, yaitu:

- 1) Surat Perizinan Berusaha 5-30 GT (penerbitan SIUP, SIKPI/SIPI)
- 2) Penerbitan Buku Kapal Elektronik (e-BKP)
- 3) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
- 4) Penerbitan Surat Kelaikan Operasi Kapal Perikanan (SLO)
- 5) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- 6) Perizinan Budidaya Laut s.d. 12 mil dan budidaya lintas kabupaten/kota
- 7) Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- 8) Pelayanan Verifikasi Pengajuan NIB dan Sertifikasi Standar Pengolahan dan Pemasaran
- 9) Penerbitan Rekomendasi BBM bagi Nelayan
- 10) Perizinan Penampungan dan Penyaluran Air Minum (Pemanfaatan Air Laut selain untuk Energi)
- 11) Perizinan Penampungan dan Penyaluran Air Baku (Pemanfaatan Air Laut selain untuk Energi)
- 12) Perizinan Penyiapan Lahan melalui Pembukaan Lahan untuk Reklamasi

- **UPT PMHP (Penerapan Mutu Hasil Perikanan), UPT Balai Perbenihan Perikanan dan UPT Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;** melayani masalah non perizinan:

UPT PMHP

- 1) Uji mutu hasil perikanan

UPT Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 1) Layanan penjualan es balok di PPI
- 2) Pelayanan tambat labuh kapal
- 3) Sewa *mess* nelayan andon

UPT Balai Perbenihan Perikanan

- 1) Layanan Penjualan Benih Ikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelayanan-pelayanan baik perijinan maupun non perijinan dimana kelompok sasaran pelayanan adalah pelaku usaha kelautan perikanan yang antara lain terdiri dari :

- Nelayan
- Pembudidaya Ikan
- Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan
- Petambak Garam
- Masyarakat Pengawas Perikanan, dan
- Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- *Stakeholder* kelautan dan perikanan lainnya

Sampai dengan tahun 2025, jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdata pada Dislutkan Provinsi baik berdasarkan data statistik maupun data monev:

Tabel 2.8 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Per Juni 2025

No	Pelaku Usaha	Jumlah
1	Nelayan	94.887 orang
2	Kelompok Nelayan	3.432 kelompok
3	Pembudidaya	35.900 orang
4	Kelompok Pembudidaya	44 kelompok
5	Pengolah	932 orang
6	Kelompok Pengolah	338 kelompok
7	Pemasar	803 orang
8	Kelompok Pemasar	287 kelompok
9	Petambak Garam	156 orang
10	Kelompok Usaha Garam	16 kelompok
11	Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	159 kelompok

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menghadapi berbagai dinamika permasalahan yang timbul. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumberdaya kelautan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun sumberdaya lautnya yang besar	Kualitas SDM Pelaku usaha kelautan perikanan yang relatif rendah;	Peningkatan kualitas daya saing SDM, dan peningkatan layanan serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan (transformasi sosial).	Perkembangan demografi global	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja salah satunya karena <i>mismatch</i> antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan;	Kualitas Sumberdaya Manusia
	Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha;	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal (transformasi ekonomi).	Geo politik dan Geo ekonomi	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berilmu, Berdaya Saing, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan;	Daya saing sub sektor kelautan dan perikanan

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		
	Penggunaan teknologi yang masih sederhana dan tradisional		Perkembangan Teknologi	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	
	Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur kelautan perikanan yang memadai		Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Perpindahan Ibu Kota Negara	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan likuifaksi)	
	Sistem Pendataan dan Informasi yang belum terintegrasi		Perubahan Iklim	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah;	
	sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai	Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas	

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Masyarakat yang Adil dan Makmur		
	Keterbatasan BBM bersubsidi dan es					
	Penanganan Ikan di atas kapal dan pasca panen yang masih konvensional					
	Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan					
	Masih maraknya IUU Fishing	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim				Pengawasan SDKP dan Ancaman degradasi lingkungan
	Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan yang tidak seimbang					
	Regulasi yang berubah-ubah	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan				Inkonsistensi Regulasi
	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal					

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Indonesia 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”** yang dituangkan dalam 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai **Asta Cita**: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dan (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta cita tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 yaitu **“Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas”** dan dijabarkan dalam 3 (tiga) konsep: (1) Melindungi Laut dan Sumberdayanya (2) Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan dan (3) Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dan diimplementasikan dalam 5 (lima) kebijakan utama:

- (1) Memperluas kawasan konservasi laut
- (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota

- (3) Pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
- (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

dimana kesemuanya itu bertujuan untuk “Memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya dan serapan karbon”.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri menerjemahkan Visi Indonesia tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045, yaitu “Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” yang menjadi pijakan dalam penentuan arah kebijakan 2025-2029 dimana Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertransformasi menjadi pusat ekonomi global di Kawasan Timur Indonesia dengan pembangunan antar wilayah yang merata, peningkatan pelayanan publik yang inovatif dan didukung oleh ketersediaan sarana prasarana (infrastruktur) serta sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi, berdaya saing, inovatif, dan memiliki derajat kesehatan yang baik serta kondisi kehidupan sosial yang harmoni yang juga melaksanakan aktivitas ekonomi hijau, ekonomi biru dan bioekonomi secara lestari dan seimbang serta melaksanakan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ketangguhan Masyarakat Sulawesi Tengah terhadap bencana. Hal ini akan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang aman, nyaman dan produktif serta layak huni.

Berangkat dari hal tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menetapkan visi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”

Dimana visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi :

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan Kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan religius nilai dan kearifan lokal.

Dari keempat misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sektor kelautan dan perikanan masuk dalam misi 2 dan misi 3 yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Logframe Misi 2



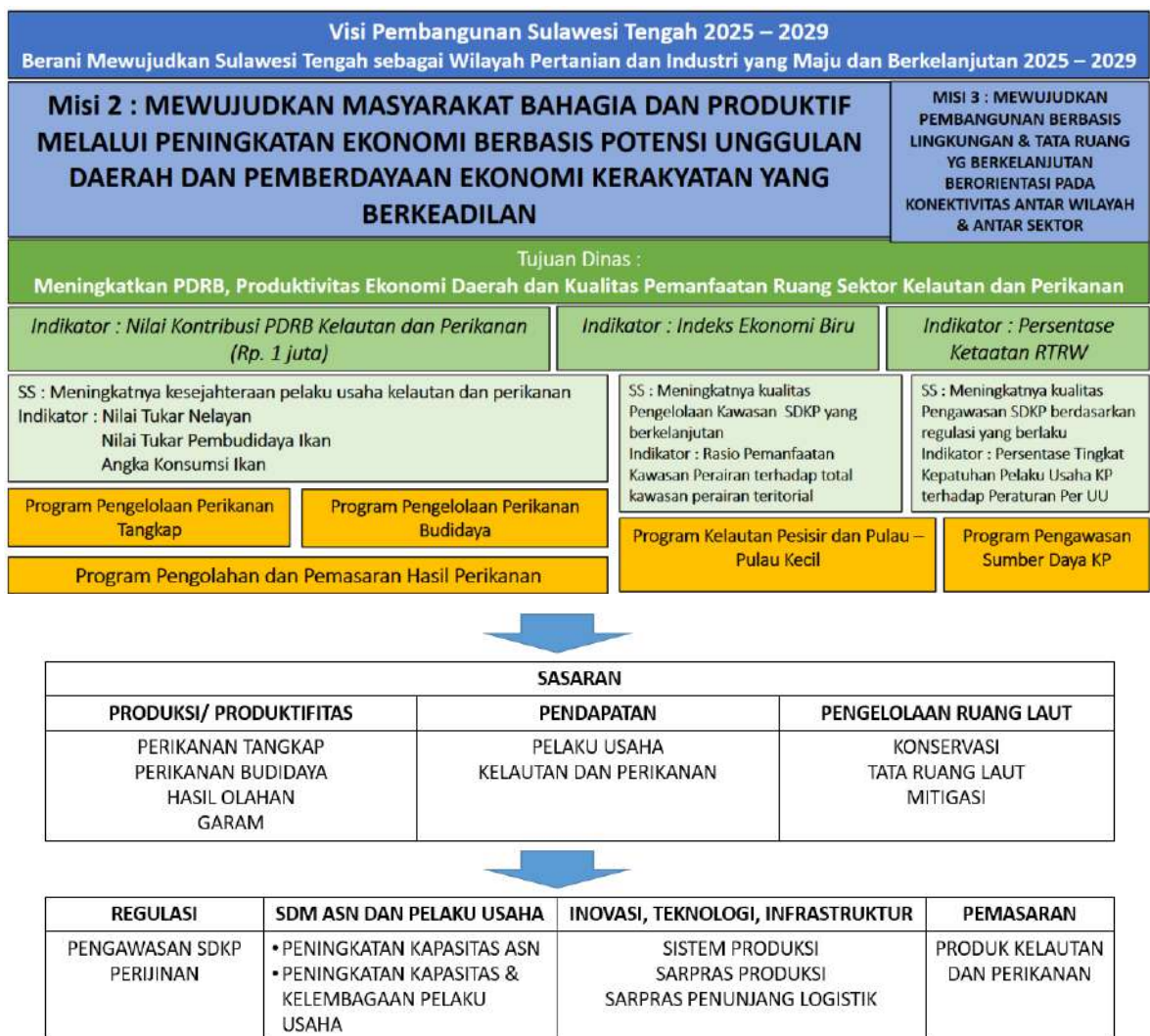
Gambar 3.2 Logframe Misi 3 Tujuan 1

sehingga dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah dengan memperhatikan sasaran-sasaran strategis pada RPJMD ditetapkan Tujuan pencapaian jangka menengah yaitu :

Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas

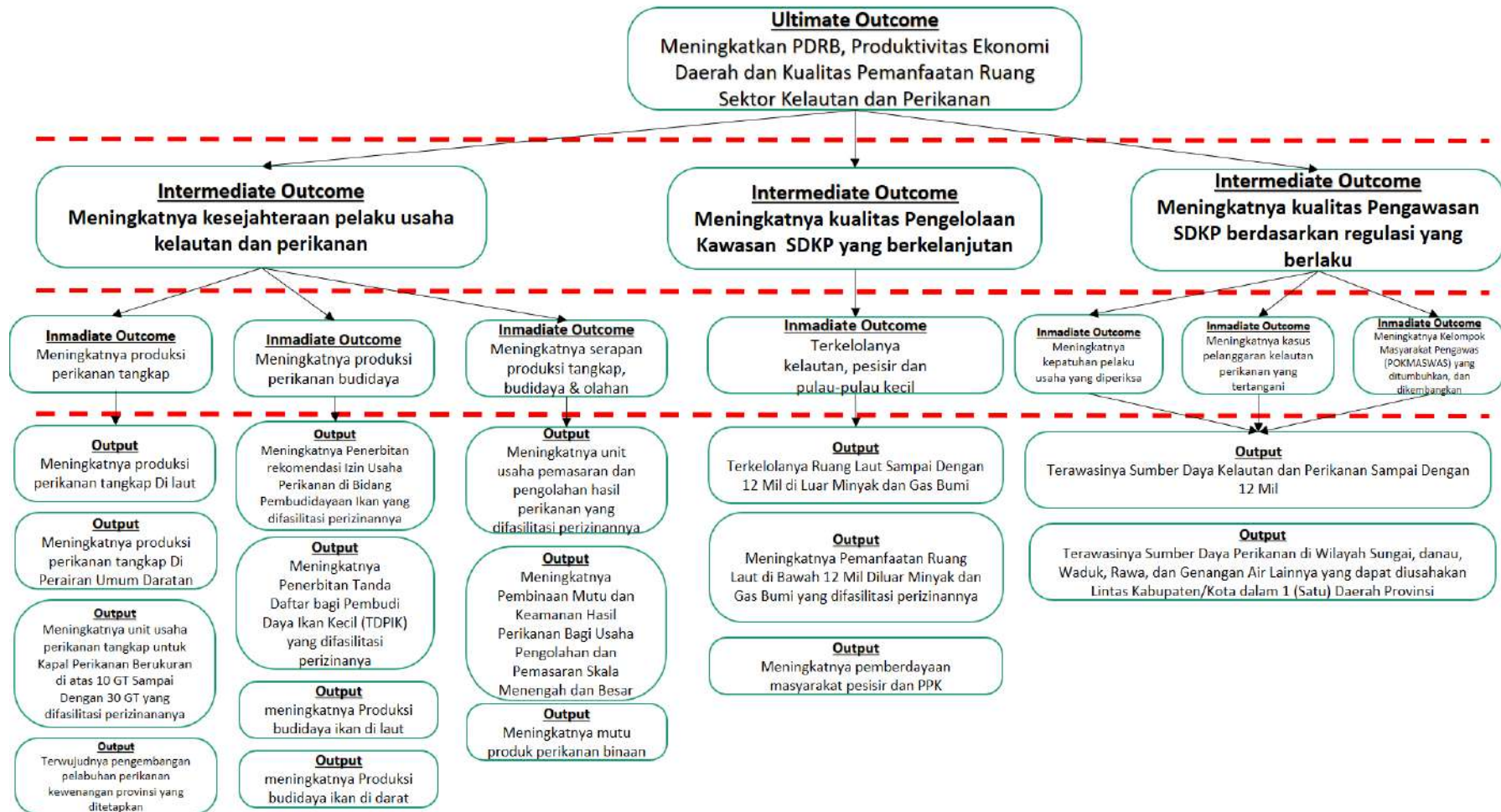
Pemanfaatan Ruang Sektor Kelautan Perikanan

Tujuan ini tersebut diarahkan pada: (1) peningkatan produksi dan produktifitas dalam rangka ketahanan pangan dan investasi, (2) peningkatan pendapatan dan (3) peningkatan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Berikut bagan alur pikir renstra 2025-2029:



Gambar 3.3 Bagan Alur Pikir Renstra 2025-2029

Cascading kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut :



Gambar 3.4 Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 3.1 Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berani Makmur (Perikanan Tangkap)				
Penguatan Basis Data Kelautan Perikanan, Pemetaan potensi perikanan tangkap dan profil unit, Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha, Uji Coba Program	Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Program	Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan, Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan sebagai acuan keberlanjutan program selanjutnya
Berani Makmur (Perikanan Budidaya)				
Penguatan data base kelembagaan, Pemetaan potensi perikanan budidaya dan profil unit, uji coba program	Uji coba pelaksanaan program dan penyusunan SOP	Implementasi program di beberapa kabupaten yang menjadi lokus kegiatan	Penguatan Program dan Pendampingan serta modifikasi kegiatan	Evaluasi terhadap capaian program
Berani Makmur (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)				
Penguatan Basis Data dan Kelembagaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penyusunan Profil Unit, Uji Coba Program Inovasi	Pelaksanaan Program, Pemantauan, Pengumpulan Data dan Informasi Capaian Kinerja Program	Pelaksanaan Program, Pemantauan dan Identifikasi Masalah dan Kendala Pelaksanaan Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Program	Pelaksanaan Program, Evaluasi dampak dan Capaian Pelaksanaan Program Lima Tahun Terakhir untuk Penyempurnaan Program Masa Mendatang
Berani Makmur (Sistem Logistik Ikan Daerah)				
penguatan basic data pengolahan dan pemasaran produk kelautan, pemetaan sistem logistik kelautan perikanan, penguatan kelembagaan pelaku usaha, uji coba program	penguatan kelembagaan pelaku usaha, pelaksanaan program	Penguatan kelembagaan Pelaku Usaha, Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan, Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan sebagai acuan keberlanjutan program selanjutnya
Berani Makmur (Pengelolaan Ruang Laut)				
Penguatan Basis	Penataan	Implementasi	Penguatan	Pelaksanaan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Ekosistem Laut dan Pesisir, Penguatan Data Spasial dalam rangka pemanfaatan ruang laut, Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir sebagai sarana penguatan keberlanjutan lingkungan	Kolaboratif, Kelembagaan, dan Regulasi Kawasan Laut dan Pesisir	Pemanfaatan Sumberdaya Laut Secara Produktif dan Berkelanjutan	Ketahanan Ekosistem Laut dan Pesisir (konservasi) sebagai Pilar Ketahanan Pangan	Evaluasi terhadap capaian ketahanan pangan dalam hal peningkatan sumberdaya ekosistem pesisir dalam pemenuhan target Ekonomi Biru
Berani Makmur (Pengawasan SDKP) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir				
Penguatan Basis data sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pantai, Penguatan Kelembagaan Pengawasan dan Penegakan Hukum	Pelaksanaan Pengawasan SDKP Berbasis Teknologi, Kajian Kerugian Ekologis dan Penegakan Hukum serta Pengenaan Denda Administratif	Pengawasan SDKP Berbasis Teknologi, Penegakan Hukum serta Pengenaan Denda Administratif Pelatihan Pengawas SDKP, PPNS, Sosialisasi serta Penguatan Peran Masyarakat Pesisir (Pokmaswas) dan Penegakan Hukum	Pengawasan SDKP Berbasis Teknologi Penegakan Hukum serta Pengenaan Denda Administratif, Revitalisasi Armada Patroli Laut, Monitoring spasial via drone & citra satelit berdasarkan pengawasan berbasis risiko	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan sebagai acuan keberlanjutan program selanjutnya

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Misi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Pelaksanaan promosi di forum nasional dan internasional	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan/ Inovasi Daerah di tingkat provinsi dan nasional	
	Penguatan sektor unggulan melalui pelatihan hilirisasi, pembangunan infrastruktur produksi, dan branding produk local	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha	
		Peningkatan sarana prasarana infrastruktur dan inovasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah produk KP	
	Revitalisasi koperasi sektor riil, digitalisasi koperasi, dan penguatan kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal	Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Masyarakat Pesisir	
	Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui inovasi ekonomi	Peningkatan kualitas pelayanan pada objek-objek dinas	Unit Pelaksana Teknis Dinas
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan	
	Pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui kawasan percontohan, regulasi transisi, dan insentif industri hijau	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan dalam rangka Implementasi Ekonomi Biru : Optimalisasi sarana prasarana dan infrastruktur pendukung kelautan perikanan, pengembangan inovasi dan teknologi	
	Pembangunan infrastruktur distribusi pangan untuk daerah rawan ketahanan pangan	Pengembangan infrastruktur pendukung Cold Chain System	
	Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)	Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)	Lokus Utama Kab. Parigi Moutong, Donggala, Morowali, Banggai Laut, Banggai Kep.
	Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut	Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut	Lokus Utama Kab. Banggai Kep.
	Pengembangan kawasan sentra garam	Pengembangan kawasan sentra garam	Lokus Utama Palu, Buol
	Dukungan Pendampingan dan Pelaksanaan serta Peningkatan SDM Pengelola Koperasi Merah Putih	Pendampingan dan Pengembangan Koperasi Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan	
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
	Perlindungan keanekaragaman hayati melalui edukasi, konservasi lokal, dan jejaring mitra nasional	Sosialisasi, peningkatan kapasitas dan jejaring mitra kelautan dan perikanan	
	Perlindungan dan pemulihan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi;	Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pengawasan Ekosistem	
	Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut;	Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut;	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 diarahkan sesuai dengan Kebijakan Pusat, RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang yang bertujuan untuk mendukung Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Berani Makmur.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan sesuai dengan Kebijakan Pusat, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang dengan pengembangan komoditas kelautan dan perikanan terbagi atas (A) Komoditas Industrialisasi: (1) Rumput Laut : (a) *Euchema cottonii*, (b) *Gracillaria sp*, (2) Tuna, Tongkol, Cakalang, (3) Udang, (4) Ikan Demersal, (5) Sidat, (6) Teripang, (7) Garam dan (B) Komoditas Ketahanan Pangan antara lain (1) Lele, (2) Nila, (3) Mas, (4) Pelagis Kecil.

Program-program yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan pula dalam mendukung Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas, yaitu : (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (3) Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, dimana semua itu bertujuan untuk memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya dan serapan karbon.

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas disusun merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 dalam rangka peningkatan PDRB subsektor kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas ekonomi sektoral melalui penerapan ekonomi biru, peningkatan kualitas

lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk mendukung program pemerintah daerah dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Pendapatan rumah tangga miskin, Pengarusutamaan Gender, Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S), Petani Milenial serta Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu).

Berikut Rencana Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah dalam :

A. Berani Makmur – Perikanan Tangkap – Dukungan SLIDA (Sistem Logistik Ikan Daerah), Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

Dalam rangka mendukung Berani Makmur – Perikanan Tangkap serta hilirisasi terhadap Tuna, Cakalang, Tongkol yang tertuang pada RPJMN 2025-2029, serta dukungan terhadap komoditas demersal, pelagis lainnya serta perairan umum daratan pada tahun 2027, dari sisi infrastruktur dan pelayanan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap difokuskan pada pengembangan dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Perikanan Lafeu, Pelabuhan Perikanan Mato dan Pelabuhan Perikanan Donggala disamping peningkatan sarana prasarana pelayanan pelabuhan perikanan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha, revitalisasi armada, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan serta pemberdayaan bagi kelompok nelayan dan nelayan miskin.

Secara umum strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut: (1) peningkatan SDM pelaku usaha; (2) penataan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pangkalan pendaratan ikan (PPI); (3) pengembangan infrastruktur kepelabuhanan pada lokasi pelabuhan provinsi yang masuk pada RIPPAN (Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional); (4) pemberdayaan nelayan skala 3-10 GT untuk Tuna, Cakalang, Tongkol; (5) pengembangan industri pengolahan (*processing and canning*) berbasis *zero waste*; (6) pengembangan industri penunjang (kapal fiberglass; dan alat tangkap ikan), (7) Pengembangan Ikan Demersal akan diintegrasikan dengan *Sea Ranching* berbasis Rumah Ikan (*Fish Home*), (8) penyiapan kelembagaan masyarakat; (9)

restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan *Fish Home*; (10) penyiapan aturan main pengelolaan dan pengawasan kawasan

B. Berani Makmur – Perikanan Budidaya – Dukungan SLIDA (Sistem Logistik Ikan Daerah), Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

a) Rumput Laut

Guna mendukung pengembangan rumput laut di Sulawesi Tengah serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dimana Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi salah satu sentra hiliriasasi rumput laut, dilakukan upaya pengembangan Rumput Laut Teknologi Kultur Jaringan di Sulawesi Tengah dimana permasalahan rumput laut di Sulawesi Tengah yaitu (1) Tingginya fluktuasi harga sehingga belum menjadi usaha pokok; (2) Rendahnya produktifitas dan mutu rumput laut, karena masih menggantungkan bibit yang diperoleh secara vegetatif dari kawasan budidaya sekitarnya; (3) Jumlah kebun bibit yang terbatas; (4) Belum diproduksi dengan cara modern melalui kebun bibit yang asal induknya hasil kultur jaringan; (5) Penyediaan bibit dipengaruhi musim; (6) Perbanyakan bibit secara vegetatif terus menerus menyebabkan pertumbuhan lambat, mudah terkena penyakit serta kandungan karaginan rendah. Metode ini dipilih karena dapat memproduksi bibit rumput laut dalam skala besar. Tidak dipengaruhi musim karena dilakukan di laboratorium, bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang identik dengan induknya, tidak memerlukan tempat yang luas dan kesehatan dan mutu bibit yang dihasilkan lebih terjamin; (7) Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

b) Pengembangan Ikan Air Tawar

Pengembangan ikan air tawar lebih diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi ikan.

Strategis pengembangan sebagai berikut: (1) Pengembangan BBI dan Sentral Budidaya Ikan Air Tawar pada kolam, tambak marginal, Perairan Umum Daratan serta disekitar kawasan perkebunan dan pertambangan, fokus pada ikan mas, dan nila; (2) kerjasama pengembangan Budidaya Ikan Hemat Air dengan penggunaan bioflok; fokus pada ikan lele, nila, dan mas; (3) Kampanye GEMARIKAN dan diversifikasi produk perikanan; dan (4) Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

c) Pengembangan Udang

Strategi Pengembangan sebagai berikut: (1) peningkatan SDM aparatur dan pelaku usaha; (2) pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan; (3) pengembangan tambak rakyat dengan komoditas Udang Windu, serta polikultur dengan bandeng dan *Gracilaria sp* melalui; (a) penguatan BBU dan produksi benih unggul; (b) revitalisasi konstruksi dan saluran tambak, (c) stimulan permodalan kerja, (d) pendampingan teknis budidaya; (4) Pengembangan Tambak komoditas Udang Vaname (*L. Vannamei*); (5) Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

4.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran, pada tahun anggaran 2027 ditetapkan beberapa beberapa usulan program dan kegiatan yang terangkum dalam anggaran APBN dan APBD, sebagai berikut:

A. Program APBN Tahun 2026

Pada APBN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 6 program besar sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Keuangan KKP, (2) Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP, (3) Pengelolaan Data Statistik dan Informasi
2. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2) Pengendalian

Penangkapan Ikan, (3) Pengelolaan Kenelayanan, (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), (5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

3. Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dengan kegiatan: (1) Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, (2) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan, (3) Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, (4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, (5) Pengelolaan Pakan Ikan.
4. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, (2) Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan, (3) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, (4) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen DJPDSPKP.
5. Program pengelolaan kelautan dan ruang laut dengan kegiatan : (1) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, (2) Perencanaan Ruang Laut, (3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen PRL.
6. Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Operasional Kapal Pengawas, (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, (3) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup:

- a) Penambahan luas kawasan konservasi laut dengan Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduksi O₂;
- b) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan
- c) Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan dengan Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, memenuhi

kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan;

- d) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- e) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dengan Menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat

Menu dan rincian Kegiatan DAK Provinsi 2026 yang akan diusulkan meliputi:

- 1) Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), berupa: (1) Penahan Gelombang (*breakwater*) (2) Turap Penahan Tanah (*revetment*) (3) Dermaga (4) Kolam Pelabuhan (5) Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan (6) Tempat Pemasaran Ikan (7) Fasilitas Air (Tawar) Bersih (8) Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) (9) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (10) Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur serta (11) Rehabilitasi Pabrik Es/*Cold Storage*
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), berupa (1) Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (2) Pembangunan Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (3) Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (4) Pembangunan Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (5) Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi (6) Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk (7) Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan (8) Penyediaan Sumber Air
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi, dan
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2026, terdapat beberapa program yang diusulkan oleh Sulawesi Tengah, yaitu :

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan(UPTD Provinsi), yang difokuskan pada PPI Mato, Banggai Laut, PPI Lafeu, Kabupaten Morowali dan PPI Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) pada HSRT Mambo, BBI Wuasa, BBI Tonusu dan BBAP Tindaki.
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi – Provinsi pada 4 KKPD dan lokasi prioritas pengawasan.

B. Program APBD Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan susunan Program/ Kegiatan untuk dana yang bersumber dari APBD dimana sebelumnya terdiri dari 6 (enam) program dan 25 kegiatan menjadi sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, meliputi (1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2) Administrasi Keuangan (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (5) Administrasi Kepegawaian Daerah (6) Administrasi Umum Perangkat Daerah (7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, meliputi (1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, meliputi (1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (4) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.
- 4) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, meliputi (1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (3) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (4) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat.
- 5) PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, meliputi : (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- 6) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, meliputi : (1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

4.3. Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan 2026

Tabel 4.1 Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan 2026

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		46.278.608.322	57.637.439.058
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.935.668.583	25.801.590.058
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	325.156.000	100.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.961.152.463	24.324.756.252
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.795.669	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.377.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.612.768.796	1.337.583.806
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.418.155	39.250.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.701.237.915	105.200.000
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.373.653.915	105.200.000
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	91.528.100	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	236.055.900	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.375.388.700	25.574.249.000
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	9.583.554.700	25.574.249.000
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	91.834.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	700.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.318.968.715	1.882.200.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.344.878.525	221.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.974.090.190	1.661.200.000
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.689.959.550	817.800.000
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.613.133.550	817.800.000
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	76.826.000	
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.257.384.859	3.456.400.000
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	74.729.500	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	641.158.466,50	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	541.496.892,50	3.456.400.000
	UPTD. Balai Perbenihan Perikanan	2.143.062.352	1.191.210.412
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.389.742.352	1.191.210.412
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.800.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.301.940	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.460.412	1.185.210.412

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.180.000	6.000.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	753.320.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	753.320.000	
	UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan	716.725.209	435.401.734
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	545.552.084	435.401.734
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.100.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.909.350	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.287.034	404.282.034
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.255.700	31.119.700
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	171.173.125	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	171.173.125	
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I	1.410.935.600	1.214.970.900
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.218.709.300	1.082.455.300
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.873.350	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.110.650	10.750.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.065.705.300	1.065.705.300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.020.000	6.000.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	28.285.700	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	28.285.700	
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	163.940.600	132.515.600
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	163.940.600	132.515.600
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II	1.311.072.672	951.041.832
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.194.077.972	951.041.832
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.810.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.938.150	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.416.832	851.041.832
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.912.990	100.000.000
15	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	92.622.300	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	92.622.300	
16	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.372.400	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	24.372.400	
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III	1.072.587.845	811.999.856
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	942.160.645	714.639.256
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.640.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.284.339	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.593.756	708.751.256
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.642.550	5.888.000
18	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	25.102.600	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas	25.102.600	

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
	Bumi		
19	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	105.324.600	97.360.600
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	105.324.600	97.360.600
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV	785.861.741	409.595.360
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	506.997.935	409.595.360
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.415.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.321.575	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.095.360	337.095.360
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.166.000	72.500.000
21	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	49.814.750	-
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	49.814.750	
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	229.049.056	-
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	229.049.056	
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V	1.104.677.400	969.250.000
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.084.367.400	969.250.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.660.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.957.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	916.990.000	916.990.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.760.000	52.260.000
24	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11.340.000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11.340.000	
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.970.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	8.970.000	
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI	941.736.425	619.446.100
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	783.870.125	571.371.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.130.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.129.765	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.388.360	567.871.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.222.000	3.500.000
27	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	86.181.300	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	86.181.300	
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	71.685.000	48.075.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	71.685.000	48.075.000
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII	357.164.480	191.450.000
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196.290.480	191.450.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.226.765	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.181.525	80.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.692.190	108.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	47.190.000	2.850.000

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
	Daerah		
30	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	96.750.000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	96.750.000	
31	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	64.124.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	64.124.000	
		56.122.432.046	64.431.805.252

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Kelautan dan Perikanan memiliki arti yang strategis bagi Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah dimana dengan potensi yang sedemikian besar diharapkan dapat memberi kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah, mendukung ketahanan pangan, penggerak ekonomi berbasis ekonomi biru yang kesemuanya memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan, terutama pada laut dan pesisir. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: (1) terbatasnya BBM bersubsidi, pupuk, pakan dan benih berkualitas (2) kelistrikan; (3) moda transportasi; (4) prasarana jalan; (5) lemahnya SDM perikanan; (6) terbatasnya sarana produksi perikanan yang mumpuni; (7) penurunan kualitas lingkungan; (8) masih terbatasnya anggaran yang mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun dengan stakeholder terkait dimana sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas.

Akhirnya, keberhasilan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tidak terlepas dari sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin penyelenggara/aparat serta peran aktif masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mensukseskan tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan/program untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian pula indikator dan target kinerja dapat dipahami secara utuh yang pada akhirnya segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan secara keseluruhan.

LAMPIRAN

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023-2024 dan Prakiraan 2027-2028

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun			Tahun			Tahun		
				2026	2027	2028	2023	2024	2025 Tw II	2027	2028	
1	2	3	4	6	7	8	9	10		11	12	13
			Nilai Tukar Nelayan	101,86	102,67	103,49	103,27	93,58	95,71	102,67	103,49	
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,54	102,04	102,55	100,47	92,01	92,57	102,04	102,55	
			Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	43,4	44,5	45,6	71,85	74,72	38,2	44,50	45,60	terget disesuaikan dengan perhitungan terbaru
			Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1804	0,1806	0,1808		0,1802	0,1802	0,1806	0,1808	Indikator baru
			Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP thd peraturan Per UU	83	84	85	81,95	93,49	78,57	84	85	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68 Nilai	25.801.590.058	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68 Nilai	25.801.590.058	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,5 Nilai	100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,5 Nilai	100.000.000	
			Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	1,00				Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	1,00		
			Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	75 Nilai				Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	75 Nilai		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	74.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	74.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	97 % 100 %	24.324.756.252	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	97 % 100 %	24.324.756.252	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/ Bulan	24.324.756.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/ Bulan	24.324.756.252	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	78 Nilai 70 Nilai 65 Nilai		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	78 Nilai 70 Nilai 65 Nilai		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130 Paket		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	253 Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	253 Orang		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	253 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	253 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100%		
			Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	65 Nilai				Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	65 Nilai		
			Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	2,6 Nilai				Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	2,6 Nilai		
			Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65 Nilai				Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65 Nilai		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	70 Nilai		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	70 Nilai		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	3 Nilai 84 Nilai	1.337.583.806	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	3 Nilai 84 Nilai	1.337.583.806	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	697.383.806	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	697.383.806	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	640.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	640.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	39.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	39.250.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	39.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	39.250.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	17,9882%	105.200.000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	17,9882%	105.200.000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	739291,71 Ha	105.200.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	739291,71 Ha	105.200.000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	736061 Ha	105.200.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	736061 Ha	105.200.000	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3231,2 Ha		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3231,2 Ha		
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50 Orang		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	50 Orang		
	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP3K		Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP3K			Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP3K		Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP3K			
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	100 %		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	100 %		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen		
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	10 %		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	10 %		
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang		
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok		
	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman		Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit		Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman		Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit		
	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman		Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit		Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman		Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	307.261,94 Ton	25.574.249.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	307.261,94 Ton	25.574.249.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap dilaut	304.147,1 Ton	25.574.249.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap dilaut	304.147,1 Ton	25.574.249.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1 Unit		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1 Unit		
	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur			Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur			
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	300 Unit	25.574.249.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	300 Unit	25.574.249.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Produksi Perikanan PUD (ton)	3114,84 Ton		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Produksi Perikanan PUD (ton)	3114,84 Ton		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	1 Dokumen		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	1 Dokumen		
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	1 Unit		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	1 Unit		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	100 %		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	100 %		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 %		Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 %		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	25%		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	25%		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	883.870,21 Ton	1.882.200.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	883.870,21 Ton	1.882.200.000	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi	100 %		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi	100 %		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko			
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi	100 %		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi	100 %		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi			
	Penerbitan Tanda Daftar bagi PembudiDayalkanKecil (TDPIK)di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)			Penerbitan Tanda Daftar bagi PembudiDayalkanKecil (TDPIK)di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi budidaya ikan di laut	707096,16 Ton	221.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi budidaya ikan di laut	707096,16 Ton	221.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	221.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	221.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit		
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit		
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan LingkunganBudidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan LingkunganBudidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	1 Unit		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	1 Unit		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi budidaya ikan di darat	176774,04 Ton	1.661.200.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi budidaya ikan di darat	176774,04 Ton	1.661.200.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	1.661.200.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	1.661.200.000	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)	55%	817.800.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)	55%	817.800.000	
			Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)	100%				Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)	100%		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	80%				Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	80%		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	230 Pelaku usaha	817.800.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	230 Pelaku usaha	817.800.000	
	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara		Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara		
	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	20Perkara		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	20Perkara		
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	1 Orang		Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	1 Orang		
	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	60 Hari Operasi		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	60 Hari Operasi		
	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit		Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit		
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	177.000.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	177.000.000	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	200 Pelaku Usaha	500.000.000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	200 Pelaku Usaha	500.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	1 Unit		Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	1 Unit		
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	140.800.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	140.800.000	
	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah		Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah		Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)	30 Pelaku Usaha		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)	30 Pelaku Usaha		
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)	257640,73 Ton	3.456.400.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)	257640,73 Ton	3.456.400.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	100 %		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	100 %		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1 Rekomendasi		Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1 Rekomendasi		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Produksi Perikanan Olahan	6883551 Kg		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Produksi Perikanan Olahan	6883551 Kg		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,65 Nilai	3.456.400.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,65 Nilai	3.456.400.000	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	20 Unit Usaha	3.456.400.000	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	20 Unit Usaha	3.456.400.000	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir		Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir		Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi		
	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				1.191.210.412	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				1.191.210.412	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. SIGI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.191.210.412	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. SIGI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.191.210.412	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.185.210.412	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.185.210.412	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	572.010.412	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	572.010.412	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	613.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	613.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	6.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	6.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	PAD (Rp1.000)	2000000 Rp. (1000)		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	PAD (Rp1.000)	2000000 Rp. (1000)		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi benih Produksi ikan	10 kg 100 Kg		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi benih Produksi ikan	10 kg 100 Kg		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi benih Produksi ikan	1,5 juta ekor 26.000 Kg		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi benih Produksi ikan	1,5 juta ekor 26.000 Kg		
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9 Unit		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9 Unit		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit		
	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)					UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	435.401.734	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	435.401.734	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	404.282.034	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	404.282.034	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	167.882.034	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	167.882.034	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	236.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	236.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	31.119.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	31.119.700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	31.119.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	31.119.700	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PALU	Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%)	50%		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PALU	Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%)	50%		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase peningkatan Pelaku Usaha/Unit usaha Pengolahan kelautan perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP	1 Inovasi		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase peningkatan Pelaku Usaha/Unit usaha Pengolahan kelautan perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP	1 Inovasi		
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				1.214.970.900	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				1.214.970.900	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kab Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	1.082.455.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kab Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	1.082.455.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	10.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	10.750.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.065.705.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.065.705.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	829.905.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	829.905.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	235.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	235.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	6.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	6.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Donggala	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I	47%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Donggala	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I	47%		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	518,287 Ha		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	518,287 Ha		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Donggala	PAD (Rp1.000)	1.096.854 Rp (1000)	132.515.600	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Donggala	PAD (Rp1.000)	1.096.854 Rp (1000)	132.515.600	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1.649.630 Kg	132.515.600	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1.649.630 Kg	132.515.600	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	132.515.600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	132.515.600	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan		
	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II				951.041.832					951.041.832	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,80 Nilai	951.041.832	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,80 Nilai	951.041.832	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	851.041.832	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	851.041.832	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	555.841.832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	555.841.832	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	295.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	295.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Parigi Moutong, Kab Tojo Una-Una, Kab Poso	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II	58%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Parigi Moutong, Kab Tojo Una-Una, Kab Poso	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II	58%		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	66702,053 Ha		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	66702,053 Ha		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Parigi Moutong	PAD (Rp1.000)	1.033.500 Rp (1000)		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Parigi Moutong	PAD (Rp1.000)	1.033.500 Rp (1000)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	2.025.965 Kg		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	2.025.965 Kg		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan		
	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III				811.999.856					811.999.856	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	714.639.256	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	714.639.256	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	708.751.256	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	708.751.256	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	492.151.256	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	492.151.256	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	216.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	216.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	5.888.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	5.888.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.888.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.888.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab. Banggai	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III	56,50%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab. Banggai	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III	56,50%		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	64442,026 Ha		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	64442,026 Ha		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Banggai	PAD (Rp1.000)	495000 Rp. (1000)	97.360.600	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Banggai	PAD (Rp1.000)	495000 Rp. (1000)	97.360.600	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	598.250 Kg	97.360.600	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	598.250 Kg	97.360.600	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	97.360.600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	97.360.600	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				409.595.360	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				409.595.360	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	409.595.360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	409.595.360	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	337.095.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	337.095.360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211.695.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211.695.360	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	72.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	72.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	72.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	72.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali Utara	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV	58%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali Utara	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV	58%		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	22430,694 Ha		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	22430,694 Ha		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali Utara	PAD (Rp1.000)	260000 Rp (1000)		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali Utara	PAD (Rp1.000)	260000 Rp (1000)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1.542.462 Kg		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1.542.462 Kg		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan		
	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V				969.250.000	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V				969.250.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab ToliToli	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	969.250.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab ToliToli	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	969.250.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	97%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	97%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	97%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	97%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	97%	916.990.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	97%	916.990.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	697.390.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	697.390.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	219.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	219.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	97%	52.260.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	97%	52.260.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	52.260.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	52.260.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Tolitoli, Kab Buol	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V	47%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Tolitoli, Kab Buol	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V	47%		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32505,209 Ha		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32505,209 Ha		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab ToliToli	PAD (Rp1.000)	800.000 Rp (1000)		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab ToliToli	PAD (Rp1.000)	800.000 Rp (1000)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	941.845 Kg		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	941.845 Kg		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan		
	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				619.446.100	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				619.446.100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Banggai laut	indeks kepuasan masyarakat	83 Nilai	571.371.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Banggai laut	indeks kepuasan masyarakat	83 Nilai	571.371.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	567.871.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	567.871.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	452.671.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	452.671.100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	115.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	115.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	3.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	3.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Banggai laut, Kab Banggai kepulauan	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI	55%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Banggai laut, Kab Banggai kepulauan	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI	55%		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	410792,3655 Ha		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	410792,3655 Ha		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Banggai Laut	PAD (Rp1.000)	520000 (Rp1.000)	48.075.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Banggai Laut	PAD (Rp1.000)	520000 (Rp1.000)	48.075.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	165000 Kg	48.075.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	165000 Kg	48.075.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	48.075.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	48.075.000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	4 Layanan		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	4 Layanan		
	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				191.450.000	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				191.450.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali	indeks kepuasan masyarakat	83 Nilai	191.450.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali	indeks kepuasan masyarakat	83 Nilai	191.450.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	80.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	80.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	108.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	108.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	63.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	63.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	2.850.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	2.850.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.850.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII	64%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII	64%		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	138.669,87		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	138.669,87		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100 %		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100 %		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi ikan yang didaratkan (kg)	1.368.865 Kg		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi ikan yang didaratkan (kg)	1.368.865 Kg		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan		

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah
Periode / Tahun

: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
: 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68 Nilai	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,5 Nilai	
			Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	1,00	
			Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	75 Nilai	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindakanlanjutan Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	97 % 100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/ Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	78 Nilai 70 Nilai 65 Nilai	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	253 Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	253 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tindakan lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100%	
			Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	65 Nilai	
			Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	2,6 Nilai	
			Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65 Nilai	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	70 Nilai	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	3 Nilai 84 Nilai	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	12 kab/1 kota	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan (%)	17,9882%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	739291,71 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	736061 Ha	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3231,2 Ha	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	50 Orang	
	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP3K		Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP3K		
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	100 %	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	10 %	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	
	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman		Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit	
	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman		Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/1 kota	Produksi Perikanan Tangkap	307.261,94 Ton	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap dilaut	304.147,1 Ton	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1 Unit	
	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	300 Unit	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Produksi Perikanan PUD (ton)	3114,84 Ton	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	1 Dokumen	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	1 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	100 %	
	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 %	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	25%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/1 kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	883.870,21 Ton	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi	100 %	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi	100 %	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi		
	Penerbitan Tanda Daftar bagi PembudiDayaIkanKecil (TDPIK)di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi budidaya ikan di laut	707096,16 Ton	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	1 Unit	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi budidaya ikan di darat	176774,04 Ton	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/1 kota	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)	55%	
			Persentase Tertangannya pelanggaran KP (%)	100%	
			Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	80%	
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	230 Pelaku usaha	
	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	
	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	20Perkara	
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	1 Orang	
	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	60 Hari Operasi	
	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	200 Pelaku Usaha	
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	1 Unit	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	
	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah		Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)	30 Pelaku Usaha	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/1 kota	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)	257640,73 Ton	
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	100 %	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1 Rekomendasi	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Produksi Perikanan Olahan	6883551 Kg	
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,65 Nilai	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	20 Unit Usaha	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir		Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	
2	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. SIGI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	PAD (Rp1.000)	2000000 Rp. (1000)	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi benih Produksi ikan	10 kg 100 Kg	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi benih Produksi ikan	1,5 juta ekor 26.000 Kg	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9 Unit	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	
3	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PALU	Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu	50%	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Inovasi yang diterapkan (inovasi)	1 Inovasi	
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	
4	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Donggala	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I	47%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	518,287 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Donggala	PAD (Rp1.000)	1.096.854 Rp (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1.649.630 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	9 Layanan	
5	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,80 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Parigi Moutong, Kab Tojo Una-Una, Kab Poso	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II	58%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	66702,053 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Parigi Moutong	PAD (Rp1.000)	1.033.500 Rp (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	2.025.965 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	
6	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab. Banggai	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III	56,50%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	64442,026 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Banggai	PAD (Rp1.000)	495000 Rp. (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	598.250 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan	
7	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali Utara	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV	58%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	22430,694 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali Utara	PAD (Rp1.000)	260000 Rp (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1.542.462 Kg	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3 Layanan	
8	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab ToliToli	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	97%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	97%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	97%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	97%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Tolitoli, Kab Buol	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V	47%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32505,209 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab ToliToli	PAD (Rp1.000)	800.000 Rp (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	941.845 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan	
9	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Banggai laut	indeks kepuasan masyarakat	83 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Banggai laut, Kab Banggai kepulauan	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI	55%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	55%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	410792,3655 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Banggai Laut	PAD (Rp1.000)	520000 (Rp1.000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	165000 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	4 Layanan	
10	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali	indeks kepuasan masyarakat	83 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII	64%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	55%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	138.669,87	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100 %	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi ikan yang didaratkan (kg)	1.368.865 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2026
Prakiraan Maju : 2027

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										57.637.439.058				
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Palu	68 Nilai	25.801.590.058	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68,50	29.476.163.393
3	25	01	101			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		83,5 Nilai	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84,00	504.859.286
							Persentase capaian IKU Perangkat Daerah		100%				100,00	
							Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah		75 Nilai				75,00	
3	25	01	101	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11 Dokumen	74.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Dokumen	210.358.036
3	25	01	101	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	26.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	210.358.036
3	25	01	101	0008		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Data	42.071.607
3	25	01	101	0010		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	42.071.607
3	25	01	102			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindakanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP		97 % 100 %	24.324.756.252	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 % 100 %	26.205.095.936
3	25	01	102	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		253 Orang/ Bulan	24.324.756.252	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		253 Orang/ Bulan	25.584.539.731
3	25	01	102	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	315.537.054
3	25	01	102	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157.768.527

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	102	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	105.179.018
3	25	01	102	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	21.035.804
3	25	01	102	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21.035.804
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	105.179.018
3	25	01	103	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21.035.804
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	42.071.607
3	25	01	103	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	42.071.607
3	25	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah		78 Nilai 70 Nilai 65 Nilai		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Nilai 75 Nilai 70 Nilai	357.608.661
3	25	01	105	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		130 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Paket	73.625.313
3	25	01	105	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52.589.509
3	25	01	105	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen				1 Dokumen	105.179.018
3	25	01	105	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		253 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		253 Orang	52.589.509

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	105	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		253 Orang				253 Orang	73.625.313
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor		100%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	483.751.875
						Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI		65 Nilai				70 Nilai	
						Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah		2,6 Nilai				3 Nilai	
						Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah		65 Nilai				70 Nilai	
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	157.768.527
3	25	01	106	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	52.589.509
3	25	01	106	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	189.322.232
3	25	01	106	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	42.000.000
3	25	01	106	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	42.071.607
3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE		70 Nilai		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Nilai	147.322.232
3	25	01	107	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	147.322.232
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi		3 Nilai 84 Nilai	1.337.583.806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,5 Nilai 85 Nilai	1.188.522.902
3	25	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	31.553.705
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	697.383.806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	736.253.125

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan				1 Laporan	210.358.036
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	640.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	210.358.036
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	39.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	483.823.482
3	25	01	109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		48 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Unit	63.107.411
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	39.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	210.358.036
3	25	01	109	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 Unit				1 Unit	105.179.018
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	105.179.018
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan (%)	12 kab/1 kota	17,9882%	105.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		19,1 %	2.900.000.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		739291,71 Ha	105.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		806207,30 Ha	1.975.000.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		736061 Ha	105.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		802975,098 Ha	780.000.000
3	25	02	101	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		3231,2 Ha		DANA BAGI HASIL (DBH)		3232,2 Ha	935.000.000
3	25	02	101	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		50 Orang		DANA BAGI HASIL (DBH)		50 Orang	110.000.000
3	25	02	102	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP3K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP3K						1 Dokumen	150.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	02	102		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi		100 %		DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	335.000.000
3	25	02	102	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan		1 Rekomendasi		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	02	102	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	140.000.000
3	25	02	102	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	195.000.000
3	25	02	103		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K		10 %		DANA BAGI HASIL (DBH)		10 %	590.000.000
3	25	02	103	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		100 Orang		DANA BAGI HASIL (DBH)		100 Orang	100.000.000
3	25	02	103	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1 Kelompok		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Kelompok	50.000.000
3	25	02	103	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				DANA BAGI HASIL (DBH)		20,00	75.000.000
3	25	02	103	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		1 Kelompok		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Kelompok	45.000.000
3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	160.000.000
3	25	02	103	0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	160.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	12 kab/ 1 kota	307.261,94 Ton	25.574.249.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.165.172.981
3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap dilaut	12 kab/ 1 kota	304.147,1 Ton	25.574.249.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		282.586,74 Ton	3.467.586.490
3	25	03	101	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 kab/ 1 kota	1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	800.000.000
3	25	03	101	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	12 kab/ 1 kota	1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	200.000.000
3	25	03	102	0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	12 kab/ 1 kota			DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	50.000.000
3	25	03	102	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	12 kab/ 1 kota	300 Unit	25.574.249.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		325 Unit	2.417.586.490
3	25	03	102		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi Perikanan PUD (ton)	5 kabupaten	3114,84 Ton		DANA BAGI HASIL (DBH)		3161,56 Ton	200.000.000
3	25	03	102	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5 kabupaten	1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	100.000.000
3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	5 kabupaten	1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	100.000.000
3	25	03	103		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi		100 %		DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	900.000.000
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		100 %		DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	900.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	03	103	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan		25%		DANA BAGI HASIL (DBH)		25%	3.597.586.491
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		2 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	3.597.586.491
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	12 kab/ 1 kota	883.870,21 Ton	1.882.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		892708,91 Ton	3.000.000.000
3	25	04	101		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi		100 %		DANA BAGI HASIL (DBH)		100,00	200.000.000
3	25	04	101	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 Rekomendasi		DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Rekomendasi	100.000.000
3	25	04	102	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	100.000.000
3	25	04	102		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi		100 %		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	04	102	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 Rekomendasi		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	04	104		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi				DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	04	104	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi PembudiDayalkanKecil (TDPIK)di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)				DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Rekomedasi	200.000.000
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut		707096,16 Ton	221.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		714167,13 Ton	1.850.000.000
3	25	04	105	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	350.000.000
3	25	04	105	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		3 Unit	221.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Unit	350.000.000
3	25	04	105	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		5 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Unit	350.000.000
3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	04	105	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 dokumen	350.000.000
3	25	04	105	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan LingkunganBudidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 dokumen	150.000.000
3	25	04	105	0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	300.000.000
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi budidaya ikan di darat		176774,04 Ton	1.661.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		178.541,78	750.000.000
3	25	04	106	0003	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5 Unit	1.661.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Unit	400.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	04	106	0004	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	350.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)		55%	817.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	3.000.000.000
						Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)		100%		DANA BAGI HASIL (DBH)		100%	
						Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)		80%		DANA BAGI HASIL (DBH)		80%	
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)		230 Pelaku usaha	817.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.680.000.000
3	25	05	101	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani		2 Perkara		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	05	101	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		20Perkara		DANA BAGI HASIL (DBH)		20 Perkara	265.000.000
3	25	05	101	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		1 Orang		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	05	101	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		60 Hari Operasi		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	05	101	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	05	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		15 Pelaku Usaha	177.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		15 Pelaku Usaha	320.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	05	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		200 Pelaku Usaha	500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		200 Pelaku Usaha	975.000.000
3	25	05	101	0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	05	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		15 Pelaku Usaha		DANA BAGI HASIL (DBH)		15 Pelaku Usaha	320.000.000
3	25	05	101	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		20 Kelompok Masyarakat	140.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		20 Kelompok Masyarakat	530.000.000
3	25	05	101	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan		1 Forum		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Forum	270.000.000
3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)		30 Pelaku Usaha		DANA BAGI HASIL (DBH)		30 Pelaku Usaha	320.000.000
3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		30 Pelaku Usaha		DANA BAGI HASIL (DBH)		30 Pelaku Usaha	320.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)		257640,73 Ton	3.456.400.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		265901,75 Ton	2.500.000.000
3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi		100 %		DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	210.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	06	101	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan lokasi		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	210.000.000
3	25	06	101	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		1 Rekomendasi		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi Perikanan Olahan		6883551 Kg		DANA BAGI HASIL (DBH)		7.052.002Kg	590.000.000
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		6 Kegiatan		DANA BAGI HASIL (DBH)		7 Kegiatan	590.000.000
3	25	06	103		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan		0,65 Nilai	3.456.400.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		0,7 Nilai	1.700.000.000
3	25	06	103	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	100.000.000
3	25	06	103	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi		20 Unit Usaha	3.456.400.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Unit Usaha	1.600.000.000
3	25	06	103	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir		1 Sistem Informasi		DANA BAGI HASIL (DBH)			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				1.191.210.412				3.594.021.652
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 Nilai	1.191.210.412	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	894.021.652
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	70.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	70.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	10.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	1.185.210.412	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	528.021.652
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	572.010.412	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	525.021.652
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	613.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100%	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	286.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	60.000.000
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		2 Unit				2 Unit	226.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD (Rp1.000)	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	2000000 Rp. (1000)		DANA BAGI HASIL (DBH)		1,674,265 Rp (1000)	2.700.000.000
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi benih Produksi ikan		10 kg 100 Kg		DANA BAGI HASIL (DBH)			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	04	105	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	04	105	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih Produksi ikan		1,5 juta ekor 26.000 Kg		DANA BAGI HASIL (DBH)		1,6 juta ekor 13500 Kg	2.700.000.000
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		9 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Unit	2.700.000.000
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		8 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
					UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				435.401.734				1.062.947.545
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		83 Nilai	435.401.734	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83,2 Nilai	262.947.545
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	21.240.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	21.240.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	5.200.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	5.200.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	404.282.034	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	227.800.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	167.882.034	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	160.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	236.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	67.800.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	31.119.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	8.707.545
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	31.119.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	8.707.545
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%)		50%		DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	800.000.000
3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Inovasi yang diterapkan (inovasi)		1 Inovasi		DANA BAGI HASIL (DBH)		80 %	800.000.000
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		1 Kegiatan		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Kegiatan	400.000.000
3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		1 Kegiatan		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Kegiatan	400.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				1.214.970.900				2.144.811.161
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		83 Nilai	1.082.455.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84 Nilai	946.611.161
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	68.640.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	68.640.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	10.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	28.154.228
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	28.154.228
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.065.705.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	804.006.433
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	829.905.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	603.606.433
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	235.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	200.400.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	45.810.500
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	15.810.500
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	30.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I		47%		DANA BAGI HASIL (DBH)		49%	385.700.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.700.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		518,287 Ha		DANA BAGI HASIL (DBH)		565,404 Ha	385.700.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)		1.096.854 Rp (1000)	132.515.600	DANA BAGI HASIL (DBH)		1.098.354 Rp (1000)	812.500.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan		1.649.630 Kg	132.515.600	DANA BAGI HASIL (DBH)		1.749.630 Kg	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		8 Unit	132.515.600	DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		9 Layanan		DANA BAGI HASIL (DBH)		9 Layanan	812.500.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II				951.041.832				1.704.274.107
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		85,80 Nilai	951.041.832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	631.074.107
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	30.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	30.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	30.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	30.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	851.041.832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	515.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	555.841.832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	500.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	295.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	15.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	56.074.107
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	28.074.107
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		2 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	28.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II		58%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.700.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.700.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		66702,053 Ha		DANA BAGI HASIL (DBH)		72765,876 Ha	385.700.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)		1.033.500 Rp (1000)		DANA BAGI HASIL (DBH)		1.085.175 Rp (1000)	687.500.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan		2.025.965 Kg		DANA BAGI HASIL (DBH)		2.127.263 Kg	687.500.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		7 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		6 Layanan		DANA BAGI HASIL (DBH)		6 Layanan	687.500.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III				811.999.856				1.651.684.598
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		83 Nilai	714.639.256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83,2 Nilai	578.484.598
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	68.640.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	68.640.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	15.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	708.751.256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	451.684.598
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	492.151.256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	258.484.598
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	216.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	193.200.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	5.888.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	43.160.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	5.888.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	13.160.000
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		2 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	30.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III		56,50%		DANA BAGI HASIL (DBH)		58,50%	385.700.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.700.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		64442,026 Ha		DANA BAGI HASIL (DBH)		70300,392 Ha	385.700.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)		495000 Rp. (1000)	97.360.600	DANA BAGI HASIL (DBH)		500000 Rp. (1000)	687.500.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan		598.250 Kg	97.360.600	DANA BAGI HASIL (DBH)		628.162 Kg	687.500.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit	97.360.600	DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		9 Layanan		DANA BAGI HASIL (DBH)		9 Layanan	687.500.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				409.595.360				1.211.147.545
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		83 Nilai	409.595.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83 Nilai	262.947.545

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD		97 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	5.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	10.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	337.095.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	210.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	211.695.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	180.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	125.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	30.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	72.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	37.947.545
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	72.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	27.947.545
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV		58%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.700.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.700.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		22430,694 Ha		DANA BAGI HASIL (DBH)		24469,848 Ha	385.700.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)		260000 Rp (1000)		DANA BAGI HASIL (DBH)		280000 Rp (1000)	562.500.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan		1.542.462 Kg		DANA BAGI HASIL (DBH)		1.547.462 Kg	562.500.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		3 Layanan		DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Layanan	562.500.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V				969.250.000				1.862.042.634
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		83 Nilai	969.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84 Nilai	788.842.634
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD		97 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	64.560.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	64.560.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		97%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		97%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	5.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		97%	916.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	706.282.634
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	697.390.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	625.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	219.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	81.282.634

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		97%	52.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	13.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	52.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	7.000.000
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	6.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V		47%		DANA BAGI HASIL (DBH)		49,00%	385.700.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.700.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		32505,209 Ha		DANA BAGI HASIL (DBH)		35460,228 Ha	385.700.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)		800.000 Rp (1000)		DANA BAGI HASIL (DBH)		805.000 Rp (1000)	687.500.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan		941.845 Kg		DANA BAGI HASIL (DBH)		950.000 kg	687.500.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		9 Layanan		DANA BAGI HASIL (DBH)		9 Layanan	687.500.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				619.446.100				1.766.874.107
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan masyarakat		83 Nilai	571.371.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83 Nilai	631.074.107
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT		97 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	100.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	78.274.107
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	78.274.107
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	567.871.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	386.800.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	452.671.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	310.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	115.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	76.800.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	66.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	33.000.000
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	33.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		63%	385.800.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	385.800.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		410792,3655 Ha		DANA BAGI HASIL (DBH)		448137,126 Ha	385.800.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)		520000 (Rp1.000)	48.075.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		525000 (Rp1.000)	750.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)		165000 Kg	48.075.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		181500 Kg	750.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit	48.075.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		4 Layanan		DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Layanan	750.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				191.450.000				750.789.509
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan masyarakat		83 Nilai	191.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84 Nilai	52.589.509
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT		97 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	10.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	10.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	7.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	108.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	13.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	7.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	63.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	6.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	2.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	22.589.509
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	2.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	12.589.509
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII		64%		DANA BAGI HASIL (DBH)		64,5%	385.700.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)		55%		DANA BAGI HASIL (DBH)		60%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		138.669,87		DANA BAGI HASIL (DBH)		151.276,22	385.700.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)		100 %		DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	312.500.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)		1.368.865 Kg		DANA BAGI HASIL (DBH)		1.468.865 Kg	
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		1 Layanan		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Layanan	312.500.000
JUMLAH									64.431.805.252				64.789.929.231

**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan kualitas pemanfaatan ruang sektor KP	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah						Nilai Kontribusi PDRB Kelautan dan Perikanan (Rp. 1 juta)	0	11.746,96			
		Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Daerah						Indeks Ekonomi Biru (%)	0	50,5			
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang						Peresentase Ketaatan RTRW (%)	0	78			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN											57.637.439.058		
1		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	68 Nilai	25.801.590.058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0	83,5 Nilai	100.000.000		
								Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	0	100%			
								Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	0	75 Nilai			
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	25	01	1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	11 Dokumen	74.000.000		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01	1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 Laporan	26.000.000		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3	25	01	1.01 0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1 Data			
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3	25	01	1.01 0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1 Dokumen			
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindakanlanjutan Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	24%	97 % 100 %	24.324.756.252		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3	25	01	1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/ Bulan	253 Orang/ Bulan	24.324.756.252		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1 Dokumen			
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	25	01	1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	1 Dokumen			
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir	3	25	01	1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1 Laporan			
			3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	1 Laporan			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %			
			3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan			
			3	25	01	103	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan			
			3	25	01	103	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Laporan			
			3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0	78 Nilai 70 Nilai 65 Nilai			
		Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah													
			3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	130 Paket			
			3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1 Dokumen			
			3	25	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	253 Orang			
			3	25	01	105	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Terbinanya Pegawai yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan								Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	253 Orang			
			3	25	01	105	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Tersusunnya dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1 Dokumen			

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
		Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjuti Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	0	100%			
								Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	0	65 Nilai			
		Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah						Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	0	2,6 Nilai			
		Meningkatnya pengawasan kearsipan internal						Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0	65 Nilai			
			3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	5 Paket			
			3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	1 Paket			
			3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1 Laporan			
			3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1 Dokumen			
			3	25	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1 Dokumen			
			3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	70 Nilai			
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah						Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE					
			3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit			
			3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	3 Nilai 84 Nilai	1.337.583.806		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah						INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi					
			3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1 Laporan			
			3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	1 Laporan	697.383.806		
			3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan			
			3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	640.200.000		
			3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20%	100 %	39.250.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah						Persentase barang milik daerah yang dipelihara					

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	48 Unit	39.250.000			
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	6 Unit				
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3	25	01	109	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	1 Unit				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	1 Unit				
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan SDKP yg berkelanjutan							Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1802	0,1804				
2		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan (%)	0	17,9882%	105.200.000			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	528757 Ha	739291,71 Ha	105.200.000			
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	528757 Ha	736061 Ha	105.200.000			
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3230,2 Ha	3231,2 Ha				
		Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	0	50 Orang				
		Meningkatnya Kualitas Arah Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	0	100 %				
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	0	1 Rekomendasi				
		Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi	3	25	02	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	3	25	02	102	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan							
									Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	0	1 Dokumen				
		Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dan PPK	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	3,33%	10%				
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	100 Orang				
			3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	1 Kelompok				
			3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
			3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
		Terpenuhi Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	1 kelompok				
		Tersedianya sarana usaha perikanan	3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan							
									Jumlah Sarana Usaha Perikanan yang tersedia	0	1 Unit				
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan	3	25	02	103	0007	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan							
									Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang tersedia	0	1 Unit				
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan							Nilai Tukar Nelayan	95,71 Nilai	101,86 Nilai				
									Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	92,57 Nilai	101,54 Nilai				
									Angka Konsumsi Ikan	38,2 Nilai	43,4 (kg/perkapita/tahun)				
3		Meningkatnya nilai tukar bidang perikanan tangkap	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	113631,4 Ton	307261,94 Ton	25.574.249.000			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap dilaut	111341,98	304147,1 Ton				
			3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil							Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0	1 Unit				
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	300 Unit	25.574.249.000			
		Meningkatnya produksi perikanan PUD	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi Perikanan PUD	0	3114,84 Ton				
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0	1 Dokumen				
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0	1 Unit				
		Meningkatnya unit usaha perikanan tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi perizinannya	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	50%	100 %				
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	0	100%				
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Terwujudnya pengembangan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi yang ditetapkan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	0	25%				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0	2 Unit				

No	Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp		
4		Meningkatnya nilai tukar bidang perikanan budidaya	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	277850,59 Ton	883870,21 Ton	1.882.200.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terfasilitasinya Rekomendasi perizinan Berusaha Bidang pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi	0	100 %			
		Diterbitkannya Rekomendasi perizinan Berusaha Bidang pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0	1 Rekomendasi			
		Terfasilitasinya Rekomendasi perizinan Berusaha Bidang pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi	0	100 %			
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0	1 Rekomendasi			
		Meningkatnya Produksi budidaya ikan di laut	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut	312434,36	707096,16 Ton	221.000.000		
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4 Dokumen			
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0	3 Unit	221.000.000		
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0	5 Unit			
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	0	1 Unit			
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk dikembangkan, Dimanfaatkan, dan	3	25	04	105	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	0	1 Dokumen			
		Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut	3	25	04	105	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen			
		Tersedianya Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	3	25	04	105	0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	0	1 Unit			
		Meningkatnya Produksi budidaya ikan di darat	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi budidaya ikan di darat	40867,17	176774,04 Ton	1.661.200.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2026				
										Target	Rp			
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	5 Unit	1.661.200.000		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	1 Unit			
		Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP Berdasarkan regulasi yang berlaku							Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	78,57%	83,00%			
5		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang diperiksa	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)	0	55%	817.800.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya kasus pelanggaran KP yang tertangani							Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)	0	100%			
		Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan							Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	0	80%			
		Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	20 pelaku usaha	230 Pelaku usaha	817.800.000		
		Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	0	2 Perkara			
		Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara	20 Perkara			
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	0	1 Orang			
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10	60 Hari Operasi			
		Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	3	25	05	1.01	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	0	1 Unit			
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	177.000.000		
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	150 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	500.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	3	25	05	1.01	0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	0	1 Unit				
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha				
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditubuhkan, dan dikembangkan	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditubuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat		140.800.000		
		Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	0	1 Forum				
		Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha diwilayah PUD	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)	0	30 Pelaku Usaha				
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 pelaku usaha	30 Pelaku Usaha				
6		Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)	0	257640,73 Ton	3.456.400.000			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya	0	100 %				
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	0	1 Dokumen				
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	0	1 Rekomendasi				
		Meningkatnya jumlah produksi ikan	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi Perikanan Olahan	3697892,75 kg	6883551 Kg				

No	Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp		
			3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing							Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya saing (kegiatan)	0	6 Kegiatan			
		Meningkatnya mutu produk perikanan binaan	3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0	0,65 Nilai	3.456.400.000		
			3	25	06	1.03	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	1 Dokumen			
			3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
		Diberikannya Insentif dan Fasilitas bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	0	20 Unit Usaha	3.456.400.000		
			3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir						
		Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir							Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	0	1 Sistem Informasi			
UPTD. Balai Perbenihan Perikanan												1.191.210.412		
7		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	85 Nilai	1.191.210.412	UPTD. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD	20,61	97 %			
			3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1 Dokumen			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	50%	100 %			

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0		1 Laporan			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%		100 %			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		3 Paket			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%		100 %	1.185.210.412		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		1 Laporan	572.010.412		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0		1 Laporan	613.200.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%		100 %	6.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		10 Unit	6.000.000		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0		2 (Unit)			
8		Meningkatnya Nilai PAD yang dihasilkan Balai perbenihan	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Target Pendapatan Asli Daerah	124425 Rp. (1000)		2000000 Rp. (1000)		UPTD. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi benih Produksi ikan	0		10 kg 100 Kg			
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0		1 Unit			
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0		1 Unit			
		Meningkatnya produksi perikanan air payau dan tawar	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih Produksi ikan	0,2 juta ekor 1639 Kg		1,5 juta ekor 26.000 Kg			

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
								Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	9 Unit			
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
								Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	8 Unit			
UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan											435.401.734		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	83 Nilai	435.401.734	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD	24,19	97 %		
			3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1 Dokumen			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%	100 %		
			3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%	100 %		
			3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	3 Paket			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	404.282.034	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	167.882.034		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	236.400.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%	100 %	31.119.700	
			3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	31.119.700		

No	Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2026			
											Target	Rp		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)					
10		Meningkatnya penerapan standar mutu perikanan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%)	0	50%		UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya penerapan Inovasi	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Inovasi yang diterapkan (inovasi)	1 Inovasi	1 Inovasi			
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						
									Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0	1 Kegiatan			
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						
									Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	0	1 Kegiatan			
UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I														
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.214.970.900		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						
11		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	83 Nilai	1.082.455.300	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD	20,97	97%			
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1 Dokumen			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %			

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2026				
										Target	Rp			
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan				
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%	100 %	10.750.000		
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1 Paket	10.750.000			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	1.065.705.300		
			3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	829.905.300			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	235.800.000			
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	50%	100 %	6.000.000			
		3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	12 Unit	6.000.000				
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0	1 Unit				
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I		47%		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	0	55%			
			3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	0	518,287 Ha				
13		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)	564719 Rp. (1000)	1.096.854 Rp (1000)	132.515.600	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi ikan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan	503483 Kg	1.649.630 Kg			

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 unit	8 Unit	132.515.600			
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 layanan	9 Layanan				
UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II															
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	85,80 Nilai	951.041.832		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Poso, Semua Kec, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD	30,02	97 %				
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 Dokumen				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %				
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan				
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%	100 %				
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket				
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	851.041.832			
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	555.841.832			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	295.200.000			
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%	100 %	100.000.000			
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	10 Unit	100.000.000			

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0		2 Unit			
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II	5%		58%		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Poso, Semua Kec, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	5%		55%			
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat							
									Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	3335,1		66702,053 Ha			
		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)	102.181 Rp. (1000)		1.033.500 Rp. (1000)		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Poso, Semua Kec, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi ikan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan	687.743 Kg		2.025.965Kg			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 unit		7 Unit			
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan							
									Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 layanan		6 Layanan			
UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III													811.999.856		
17		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0		83 Nilai	714.639.256	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD	34,24		97 %			
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		1 Dokumen			

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2026				
										Target	Rp			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %			
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
									Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 Laporan			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%	100 %			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	708.751.256		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	492.151.256		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	216.600.000		
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%	100 %	5.888.000				
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10 Unit	5.888.000				
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0	1 Unit				
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III	0	56,50%		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	5%	55%			
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						
									Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	322,21	64442,026 Ha			

No	Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2026			
											Target	Rp		
		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)	221.970 Rp. (1000)	495.000 Rp. (1000)	97.360.600	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi ikan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan	213.892 Kg	598.250 Kg	97.360.600		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0	1 Unit	97.360.600		
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					
							Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 layanan	9 Layanan					
UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV												409.595.360		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	83 Nilai	409.595.360	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD	32,44	97 %			
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 Dokumen			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %			
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
									Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%	100 %			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket			
Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	337.095.360				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	211.695.360				

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	125.400.000			
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%	100 %	72.500.000			
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	1 Unit	72.500.000			
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0	1 Unit				
21		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV	3%	58%			UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	3%	55%				
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat							
									Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	672,92	22430,694 Ha				
22		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)	144.496 Rp. (1000)	260.000Rp. (1000)			UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi ikan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	483.478 Kg	1.542.462 Kg				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan							
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	4 Unit				
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan							
									Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 layanan	3 Layanan				
UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V													969.250.000		
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	85 Nilai	969.250.000		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V	Kab. Toli Toli, Dampal Utara, Ogotua
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD	35,43	97 %				

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 Dokumen				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ersentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %				
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan				
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	50%	97%				
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1 Paket				
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	97%	916.990.000			
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	697.390.000			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	219.600.000			
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%	97%	52.260.000			
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	52.260.000			
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0	1 Unit				
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V	7%	47%			UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V	Kab. Toli Toli, Dampal Utara, Ogotua
		meningkatkan kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	10%	55%				
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	325	32.505,209 Ha				

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)	471.143 Rp. (1000)	800.000Rp. (1000)			UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V	Kab. Toli Toli, Dampal Utara, Ogotua
		Meningkatnya produksi ikan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan	194.066 Kg	941845 Kg				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0	1 Unit				
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 layanan	9 Layanan				
UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI													619.446.100		
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan masyarakat		83 Nilai	571.371.100		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	29,21	97 %				
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 Dokumen				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %				
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan				
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %				
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket				
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	567.871.100			
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	452.671.100			

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2026				
										Target	Rp			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	115.200.000			
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%	100 %			3.500.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	1 Unit	3.500.000			
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0	1 Unit					
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI	10	55%		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		meningkatnya kaulitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	10	55%			
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						
								Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	41079	410792,3655 Ha				
		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD (Rp1.000)	237.746 Rp. 1000	520.000 Rp. 1000	48.075.000	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meninkatnya produksi ikan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	484.485 Kg	165.000 Kg			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0	1 Unit	48.075.000			
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						
								Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	4 layanan	4Layanan				
UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII											191.450.000			
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						
29		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan masyarakat		83 Nilai	191.450.000	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII	Kab. Morowali, Bungku Pesisir, Lafeu

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	35,54	97 %			
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	3 Dokumen			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	0	100 %			
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan			
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	80.000.000		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	3 Paket	80.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50%	100 %	108.600.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	2 Laporan	45.000.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	2 Laporan	63.600.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	50%	100 %	2.850.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit	2.850.000		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	25	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	0	1 Unit			
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII	7%	63,50%		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII	Kab. Morowali, Bungku Pesisir, Lafeu
		meningkatkan kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	3	25	02	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	7%	55%			
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	9706,83	138669,872 Ha			

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tw 2 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Terlaksananya pelayanan di Pelabuhan Perikanan	3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	0	100 %		UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII	Kab. Morowali, Bungku Pesisir, Lafeu
		Meningkatnya produksi ikan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	0	1.368.865 Kg				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0	1 Unit				
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0	1 Layanan				
		J U M L A H											64.431.805.252		